

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Dasep Dodi Hidayah^{1*}, Nidia Risma Dewy²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: dasephidayah89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena penulis melihat adanya masalah yang timbul yaitu belum Optimalnya Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Tasikmalaya dan mengambil studi kasus di Kecamatan Rajapolah. Belum tercapainya Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Tasikmalaya dari pelaksanaan model-model implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara keseluruhan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya rumusan masalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Tasikmalaya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai "Human Instrument" berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memilih kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan model-model kebijakan yang belum dilaksanakan secara optimal dalam melaksanakan program pengembangan industri kreatif di Kabupaten Tasikmalaya adalah : Model Sumber Daya dan Model Struktur Birokrasi. Sedangkan penerapan model-model kebijakan pada pengembangan industri kreatif yang sudah baik atau yang sudah dilaksanakan sepenuhnya secara optimal adalah : Model Komunikasi dan Disposisi/Sikap Pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi, Industri Kreatif, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

The background of this research is because the authors see that there are problems that arise, namely the lack of Optimal Empowerment of Creative Industry Development in Tasikmalaya Regency and take a case study in Rajapolah District. The Empowerment of Creative Industry Development in Tasikmalaya Regency has not been achieved from the implementation of policy implementation models that have not been implemented as a whole by the Tasikmalaya Regency Government. Furthermore, the formulation of the problem: How is the Policy Implementation of the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 72 of 2015 concerning Empowerment of Creative Industry Development in Tasikmalaya Regency?. The methods used in this study are: Descriptive qualitative research method as a "Human Instrument" functions to determine the focus of research, select informants as data sources, collect data, select data quality, analyze data, interpret data and draw conclusions on existing findings. in the field. From

the results of the study, it is known that the application of policy models that have not been implemented optimally in implementing the creative industry development program in Tasikmalaya Regency are: the Resource Model and the Bureaucratic Structure Model. Meanwhile, the implementation of policy models in the development of creative industries that have been good or have been fully implemented optimally are: Communication Model and Disposition/Attitude of Implementing.

Keywords: *Implementation, Creative Industry, Public Policy*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber perekonomian dari industri kreatif salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Rajapolah. Secara ekonomi masyarakatnya bergabung pada pengembangan industri industri kreatif, dari sinilah mereka dapat menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Penghasilan tersebut masih kurang untuk mencukupi kebutuhan, karena pada kenyataan harga kebutuhan pokok semakin melambung serta kebutuhan untuk anak-anak mereka bersekolah. Industri kerajinan ini membantu perekonomian masyarakat setempat. Dalam membuat kerajinan tangan ini tidak terikat oleh kontrak atau perjanjian kerja, sehingga pekerjaan ini dapat dilakukan kapan saja dan dapat dikerjakan dirumah sesuai dengan Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan gejala-gejala permasalahan tentang pemberdayaan pengembangan industri kreatif yang masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu diantaranya:

1. Peran Pemerintah Kecamatan dalam hal tanggap atas keluhan dan pengaduan masih belum optimal.

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya ekonomi kreatif di Bidang Industri Ekonomi Kreatif terhadap para kelompok usaha mikro di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga masyarakat tidak mengetahui arti pentingnya berwirausaha melalui ekonomi kreatif.

Terkait hal tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya”, khususnya terkait dengan pengembangan kewirausahaan menuju ekonomi kreatif yang menitikberatkan pada upaya mengoptimalkan kreativitas berbasis sumber daya perempuan dengan menghindari eksploitasi sumber daya alam sehingga dapat mewujudkan manfaat yang berkesinambungan.

Adapun untuk fokus penelitian penulis melalui pengenalan usaha ekonomi kreatif tentang pemberdayaan perempuan bagi perempuan diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perempuan tentang pengelolaan usaha ekonomi kreatif kepada implementasi kebijakan pengembangan industri kreatif dan

locusnya di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Rumusan masalah yang komprehensif tentang upaya pengembangan pemberdayaan perempuan dapat melengkapi pengetahuan perempuan dalam menjalani dan mengelola usaha ekonomi kreatif yang relatif cukup memiliki perbedaan dengan usaha menengah dan besar, namun kendala yang sering dihadapi adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya?

Berlandaskan pada latar belakang dan problem statment yang telah diuraikan diatas dan pengkajian peneliti terhadap beberapa literatur kebijakan publik sebagai landasan peneliti dalam mengkaji permasalahan “Implementasi kebijakan pengembangan industri kreatif dan locusnya di Kabupaten Tasikmalaya”.

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mewujudkan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat maupun tujuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha mengimplementasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, namun pada kenyataannya permasalahan seputar Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Rajapolah Kabupaten

Tasikmalaya yang masih menjadi permasalahan sangat pelik

Berkenan dengan uraian di atas, anggapan dasar atau landasan pemikiran dalam penelitian adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli Menurut Meter dan Horn (Agustino, 2018, hal. 139), implementasi kebijakan adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Selanjutnya serangkaian kegiatan implelementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki harus dilakukan berdasarkan model proses atau alur Edward III (Kusnandar, 2014, hal. 104), mengemukakan bahwa ada empat faktor yang diperlukan demi suksesnya implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Karena itu mereka harus meminta penjelasan sehingga tidak terjadi kesalahan. Demikian pula dengan para pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah harus meneruskan kebijakan yang dibuat kepada aparat atau para pelaksana kebijakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Struktur Birokrasi mempunyai dampak atas penerapan kebijakan, hal ini berarti penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat

kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. Ada dua karakteristik birokrasi yang umum yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta pragmatisme dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi. Dengan demikian struktur birokrasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan pemerintah, yaitu bisa sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana
Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan diantara para pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka para pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sebelum melaksanakan kebijakan tersebut para pelaksana harus memiliki ketegasan dan kejelasan dalam bersikap tentang apa yang akan mereka laksanakan.

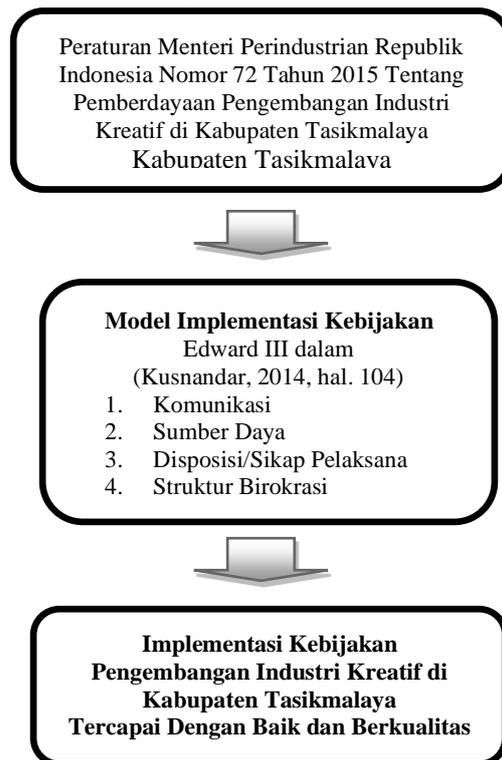
4. Struktur Birokrasi
Sumber daya yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah parastaf atau pegawai dalam jumlah dan keahlian yang sesuai, informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan dan pemenuhan informasi bagi yang lainnya yang terlibat dalam pelaksana, adanya wewenang yang memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan apa

yang telah ditentukan, serta adanya fasilitas-fasilitas.

Keempat faktor yang dikemukakan Edward III dalam Kusnandar Ishak tersebut merupakan alat analisis peneliti dalam mengkaji permasalahan “Implementasi kebijakan pengembangan industri kreatif dan locusnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai kerangka pemikiran, penulis menyajikan gambar model kerangka pemikiran, seperti terlihat di halaman selanjutnya:

Model Kerangka Pemikiran



B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif sejalan dengan menurut Creswell

(Ahmad, 2015, p. 52) pengertian metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Yang dijadikan informan penelitiannya mengacu kepada Spradley dalam (Sugiyono, 2016, p. 56), menyatakan bahwa sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga nara sumber informan.

Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

mereka yang berkompeten sesuai dengan kriteria tersebut yaitu terdiri dari unsur Pegawai Kecamatan, Kelompok Pemberdayaan dan Masyarakat Umum

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang benar-benar harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama tersebut adalah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta verifikasinya. Seperti :

1. Reduksi Data

Bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

2. Display Data (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan secara deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dari analisis data. Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara kualitatif diatas mengenai: “Kebijakan Pada Pengembangan Industri Kreatif di Kabupaten

Tasikmalaya”, yang berlandaskan kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Pengembangan Industri Kreatif yang mengambil studi kasus di Kecamatan Rajapolah, maka pelaksanaan penerapan model-model kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan secara keseluruhan yaitu :

Penerapan model-model kebijakan yang belum dilaksanakan secara optimal dalam melaksanakan program pengembangan industri kreatif bagi kelompok pemberdayaan industri kreatif Kabupaten Tasikmalaya adalah Model dimensi Sumber Daya, untuk dimensi ini berdasarkan hasil penelitian lapangan maka hasilnya masuk pada kategori kurang baik. Selain dimensi sumberdaya, Struktur Birokrasi juga masuk pada kategori kurang dan harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan penerapan model-model kebijakan pada pengembangan industri kreatif yang sudah baik atau yang sudah dilaksanakan sepenuhnya secara optimal di Kabupaten Tasikmalaya adalah Model dimensi Komunikasi dan Disposisi/Sikap Pelaksana, walaupun sudah dilaksanakan dengan baik tapi harus lebih ditingkatkan lagi supaya lebih sejalan dengan program atau visi misi Pemerintah Pusat yang terus melakukan perbaikan supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan global.

Dari penjelasan di atas, mengacu pada Hierarki kebijakan pada pengembangan industri kreatif berdasarkan teori Edward III dalam Kusnandar Ishak bahwa kebijakan pada pengembangan industri kreatif di Kabupaten Tasikmalaya sangatlah penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk membantu

roda ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya adalah karena adanya model-model kebijakan pada pengembangan industri kreatif yang dijalankan oleh para pegawai walaupun belum sepenuhnya secara optimal dijalankannya perlu peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang demi tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Jadi dari uraian di atas, kebijakan pada pengembangan industri kreatif berdasarkan kepada model-model kebijakan pelaksanaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian pada pengembangan industri kreatif yang lebih baik di Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan pada pengembangan industri kreatif yang efektif dapat berarti tercapainya tujuan pelayanan yang telah ditetapkan birokrasi dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang didapatnya.

D. KESIMPULAN

Pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implemementasi kebijakan sesungguhnya tidak menyangkut struktur birokrasi atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Dan sarannya supaya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih mengembangkan sektor ekonomi industri kreatif baik dari segi regulasi yang tepat juga pelayanan yang lebih baik lagi baik kepada pengrajin maupun konsumen

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, (2008), *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Mas Agung.
- Dwiyanto, (2008), *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : IIP Press.
- Islamy, (2014), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kusnandar, (2014), *Kebijakan Publik dari Formulasi, Implentasi ke Evaluasi*. Bandung: Multazam
- Sinambela, (2006), *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, (2004), *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.
- Tangkilisan, (2011), *Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- Winarno, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressind
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang PEMBERDAYAAN Pengembangan Industri Kreatif
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.